



RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

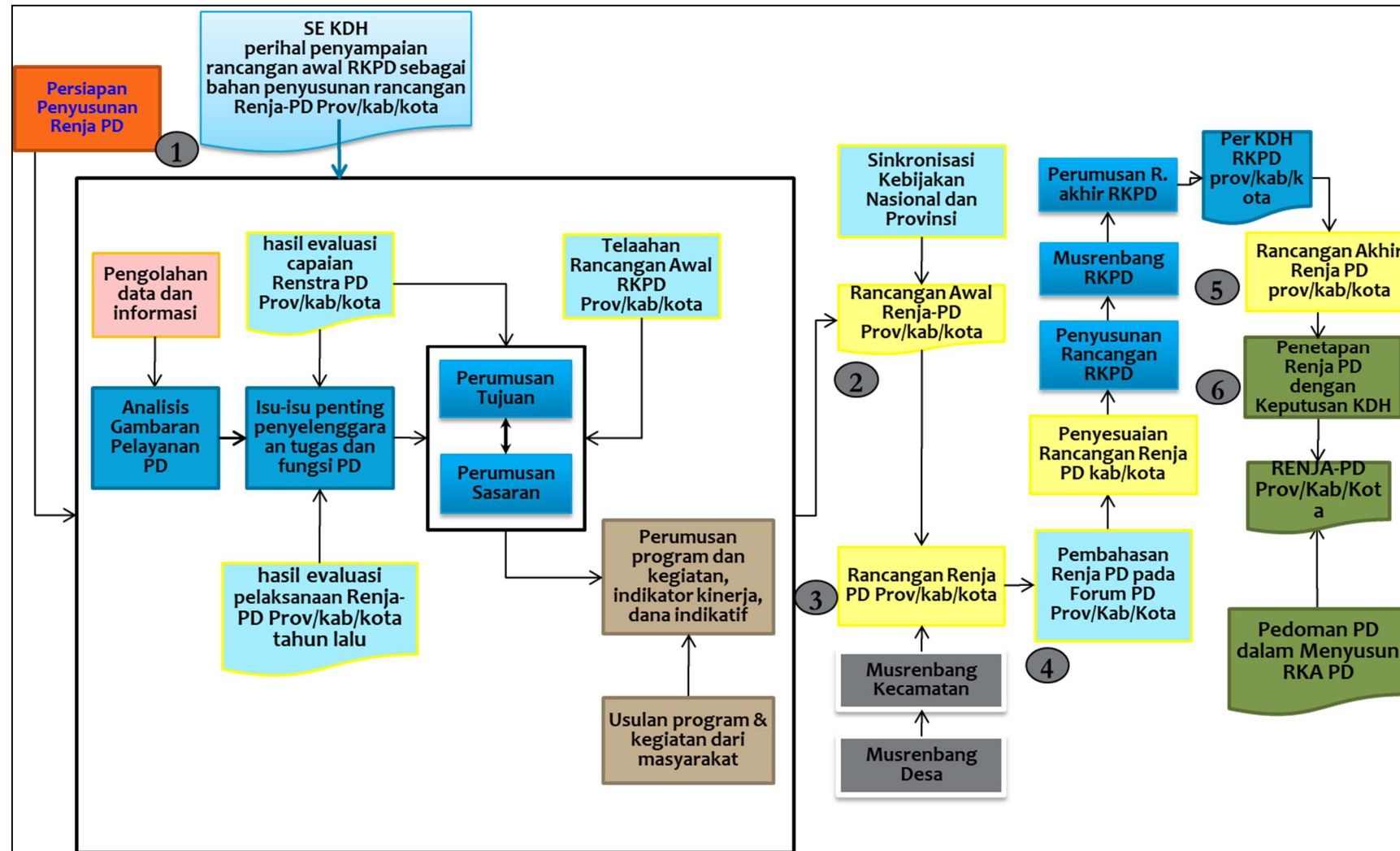
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu “ **Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Komprehensif dan Berkelanjutan** ”, dan penjabaran dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana**”.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hokum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi :

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019 -2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019 - 2024.

Dengan demikian, dapat dilihat faktor - faktor pendorong keberhasilan dan factor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Pada tahun anggaran 2021 Anggaran Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 16.713.115.619,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.415.569.098,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.297.546.521,- .Dengan total realisasi sebesar Rp. 15.907.303.966,- (94,58 %) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.935.751.619,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 20 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

TabelT-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan : Lingkungan Hidup										
1	03										
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100%
1	03	01	01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	surat	5.400	2750	900	950	106%
					Jumlah rekening listrik, air dan telepon	bulan	60	24	12	12	100%
					Jumlah STNK dan KIR kendaraan dinas roda 4, roda 3 dan roda 2	unit	425	148	85	85	100%
					Jumlah rapat staf meeting, rakor dinas yang dilakukan	ob	30	10	5	5	100%

					Jumlah tenaga kotrak honorarium daerah	ob	15	8	3	3	100%			
1	03	01	02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	jenis	200	40	38	38	100%			
					Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	75	15	12	12	100%			
					Jumlah komponen instalasi listrik/alat penerangan	jenis	50	10	10	10	100%			
					Jumlah perlengkapan kantor	jenis	15	3	2	2	100%			
					Jumlah surat kabar	bulan	60	12	12	12	100%			
					Jumlah peralatan kebersihan	jenis	150	30	31	31	100%			
1	03	01	03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat – rapat koordinasi dinas luar daerah	ok	500	96	94	94	100%			
					Jumlah rapat – rapat koordinasi dinas dalam daerah	ok	400	75	78	78	100%			
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100%			
1	03	02	01	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung ktr dan pagar kantor	pkt	5	1	1	1	100%			
1	03	02	02	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dan dipelihara	unit	375	55	60	60	100%			
1	03	02	03	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan /pemeliharaan alat rumah tangga lainnya	unit	75	10	15	1	7%			
					Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kantor	Unit	475	95	93	61	66%			

1	03	02	04	Pengadaan pakaian dinas	Jumlah pakaian seragam yang terpenuhi	jenis	5	1	0	0	0			
1	03	3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100	100	100	36	36%			
1	03	3	01	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	OK	75	15	15	15	100%			
1	03	4		Program Peningkatan Sistem perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100%			
1	03	4	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen LKJIP, laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	dok	20	5	5	5	100%			
1	03	4	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	dok	20	4	4	4	100%			
1	03	4	03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah partisipasi pawai pembangunan yang diikuti	kali	10	1	0	0	100%			
				Program Penataan dan Pengendalian lingkungan hidup	Persentase pelanggaran lingkungan yang dielesaikan	%	100	100	100	100	100%			
					Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	%	267	87	42	42	100%			
				Penaatan dan pentaatan Lingkungan Hidup	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH	Usaha	600	120	120	60	50%			
					Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	titik	310	62	62	62	100%			
				Fasilitasi Pengaduan, pengendalian, dan penegakan hukum lingkungan	Tersedianya indeks kualitas air	Sampe l air	100	20	20	3	15%			

				Tersedianya indeks kualitas udara	Sampe l udara	80	16	16	3	19%			
				Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran	Kec	70	14	14	14	100%			
				Peningkatan PSM dalam pengendalian	Event	10	2	2	0	0			
			Fasilitasi pengkajian dan analisis dampak lingkungan	Penyusunan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	dok	5	1	1	1	100%			
			Peningkatan laboratorium lingkungan	Penyediaan bahan kimia laboratorium	jenis	150	28	28	28	100%			
				Penyediaan alat kimia laboratorium	paket	5	1	1	1	100%			
				Kalibrasi alat kimia laboratorium	paket	5	1	1	1	100%			
			Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase penurunan timbulan sampah	%	110	20	22	17.4	66%			
			Pengelolaan sampah dan limbah B3	Pengelolaan sampah dan limbah B3 di TPA	Keg	30	6	6	6	100%			
			Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Keg	30	6	6	6	100%			
			Peningkatan layanan kebersihan jalan dan lingkungan	Koordinasi kota sehat Adipura	kali	50	10	10	10	100%			
				Peningkatan ops dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	keg	50	10	10	10	100%			
			Konservasi, rehabilitasi lingkungan dan pertamanan	Cakupan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	ha	7	5	5	4.8	96%			
				Persentase luas RTH perkotaan	%	55	10.8	10.8	15.5	143%			
			Penataan konservasi dan rehabilitasi lingkungan	Penanaman bibit seluas 1 ha	ha	5	1	1	1	100			

				Pengelolaan RTH	Belanja bibit tanaman	bibit	105	21	21	21	100%			
					Pengadaan alat pemeliharaan tanaman	Paket	20	4	4	4	100%			
					Pemeliharaan dan penataan dekorasi kota	lokasi	95	19	19	19	100%			

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran 2019, Anggaran Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 23.589.594.020,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.449.134.098,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.140.459.922,- dengan total realisasi sebesar Rp. 18.190.481.132,- (77.11 %) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.888.619.383,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.301.861.749,- Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 20 kegiatan.
2. Semua Program dan Kegiatan dari Renstra pada tahun 2021 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sebagaimana sebagai berikut :

- Permasalahan

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran terserap Rp. 426.876.967,- dari dana Rp. 477.692.900,- target mencapai 89,4% karena adanya pemangkasan anggaran disebabkan oleh Pandemi Covid-19 sehingga honorarium PPTK disesuaikan dengan dana yang dikelola, Honorarium Tenaga Kontrak untuk Hari Raya dan honor ke 13 tidak diberikan karena adanya perubahan peraturan, kebutuhan listrik dan telepon disesuaikan dengan tagihan yang ada.
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dananya tidak terserap dikarenakan kegiatan Pawai Pembangunan pada Pandemi Covid-19 ditiadakan.

- Solusi

Sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diperlukan, karena ada pemangkasan pandemic covid.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indicator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019 - 2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prosentase pelanggaran lingkungan yang diselesaikan		√		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan		√		11,90	13,95	15,90	17,78	17,70	13,95	15,90	17,78	
3	Persentase penanganan timbulan sampah		√		12	13	14	15	12	13	14	15	
4	Prosentase pengurangan timbulan sampah		√		2,45	3	4	5	2,45	3	4	5	
5	Cakupan wilayah rawan longsor dan sumber mata air		√		5	5,5	6	6,5	4,8	5	6	6,5	
7	Peningkatan luas RTH perkotaan		√		10,8	11,60	12,40	13,20	15,46	16	16,8	17	

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencanaan hingga tahapan penganggaran.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024, isu - isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam RPJMD masih belum optimal;
2. Koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal;
3. SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas;

Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan - usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	10.379.567.466	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	10.379.567.466
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 %	30.699.525	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 %	30.699.525
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RPJMD, Renstra, dan Renja)	3 Dokumen	3.667.325	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RPJMD, Renstra, dan Renja)	3 Dokumen	3.667.325
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.580.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.580.700

2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	3.975.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DLH	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	3.975.000
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.906.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.906.000
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	4.975.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	4.975.000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah dokumen evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, SPIP dan RB) yang disusun	5 Dokumen	8,795.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah dokumen evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, SPIP dan RB) yang disusun	5 Dokumen	8,795.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	8.944.506.554	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	8.944.506.554
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	102 orang	8.889.754.420	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	102 orang	8.889.754.420
2.11.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	40.395.494	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	40.395.494

2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	4.080.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	4.080.000
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	4.841.730	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	4.841.730
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	5.434.910	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DLH	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	5.434.910
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dengan jumlah ASN OPD	100 %	170.290.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dengan jumlah ASN OPD	100 %	170.290.000
2.11.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	DLH	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atributnya	314 org	108.975.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	DLH	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atributnya	314 org	108.975.000
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek / Diklat	20 OK	61.315.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek / Diklat	20 OK	61.315.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	337.412.946	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	337.412.946
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15 Jenis	17.937.330	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15 Jenis	17.937.330
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis	40.989.715	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis	40.989.715

			yang disediakan					yang disediakan		
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	43.682.925	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLH	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	43.682.925
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	3.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH	Jumlah pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	3.840.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	Jumlah makanan dan minuman staff meeting dan tamu yang difasilitasi	96 Ok	39.610.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH	Jumlah makanan dan minuman staff meeting dan tamu yang difasilitasi	96 Ok	39.610.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DLH	Jumlah BBM, jumlah perjalanan dinas biasa, jumlah perjalanan dinas dalam kota, penyediaan makananan dan minuman rapat	3648 ltr, 40 OK, 60 OK, 1359 OK	191.352.976	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DLH	Jumlah BBM, jumlah perjalanan dinas biasa, jumlah perjalanan dinas dalam kota, penyediaan makananan dan minuman rapat	3648 ltr, 40 OK, 60 OK, 1359 OK	191.352.976
2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	367.491.381	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	367.491.381
2.11.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	195.000.000	Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	195.000.000

2.11.01.2.07.05	Pengadaan meubel	DLH	Jumlah Pengadaan mebel	3 Jenis	23.615.570	Pengadaan meubel	DLH	Jumlah Pengadaan mebel	3 Jenis	23.615.570
2.11.01.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin lainnya	DLH	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan bahan computer, jumlah computer, jumlah laptop, jumlah layar proyektor, jumlah LCD, jumlah printer, jumlah TV	2 unit, 1unit,6 unit,1 unit,1 set, 4 unit, 2 unit	148.875.811	Pengadaan peralatan mesin lainnya	DLH	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan bahan computer, jumlah computer, jumlah laptop, jumlah layar proyektor, jumlah LCD, jumlah printer, jumlah TV	2 unit, 1unit,6 unit,1 unit,1 set, 4 unit, 2 unit	148.875.811
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Prosentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	100 %	94.083.801	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Prosentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	100 %	94.083.801
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	Jumlah surat tekirim	985 surat	4.061.593	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH	Jumlah surat tekirim	985 surat	4.061.593
2.11.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	Jumlah pembayaran listrik, air dan tlp	12 bulan	79.822.208	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	Jumlah pembayaran listrik, air dan tlp	12 bulan	79.822.208
2.11.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DLH	Honor instruktur senam, jumlah ADV/ucapan hari jadi	12 bulan, 6 kali	10.200.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DLH	Honor instruktur senam, jumlah ADV/ucapan hari jadi	12 bulan, 6 kali	10.200.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	403.450.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	403.450.000

2.11.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah kendaraan sewa, jumlah pemeliharaan kendaraan, jumlah perijinan, pajak kend/ops terpenuhi	1 kend, 3 kend, 90 kend	262.900.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DLH	Jumlah kendaraan sewa, jumlah pemeliharaan kendaraan, jumlah perijinan, pajak kend/ops terpenuhi	1 kend, 3 kend, 90 kend	262.900.000
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	DLH	Jumlah pemeliharaan mebel	21 unit	6.300.000	Pemeliharaan mebel	DLH	Jumlah pemeliharaan mebel	21 unit	6.300.000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	DLH	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	53 unit	22.250.000	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	DLH	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	53 unit	22.250.000
2.11.01.2.09.09	Penataan organisasi	DLH	Jumlah kegiatan pameran, jumlah kegiatan pawai	1 keg, 1 keg	31.433.259	Penataan organisasi	DLH	Jumlah kegiatan pameran, jumlah kegiatan pawai	1 keg, 1 keg	31.433.259
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota		Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota		Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	DLH	Jumlah dokumen RPPLH Kab. Sampang yang terpenuhi	3 dok	276.788.392	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	DLH	Jumlah dokumen RPPLH Kab. Sampang yang terpenuhi	3 dok	276.788.392
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN		a. Persentase pelaku usahayang taat terhadap peraturan lingkungan, b. Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	31%, 15.90%	460.779.876	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN		a. Persentase pelaku usahayang taat terhadap peraturan lingkungan, b. Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	31%, 15.90%	460.779.876

			yang ditangani					yang ditangani		
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat	350 usaha	420.779.876	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang taat	350 usaha	420.779.876
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah , air, udara, dan laut	DLH	Jumlah sampel air yang dianalisa, jumlah sampel udara ambient yang dianalisa, jumlah usaha/keg yg belum memiliki ijin lingk/ijin PPLH yg diberi sosialisasi	56 sampel, 24 sampel, 350 usaha	195.518.855	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah , air, udara, dan laut	DLH	Jumlah sampel air yang dianalisa, jumlah sampel udara ambient yang dianalisa, jumlah usaha/keg yg belum memiliki ijin lingk/ijin PPLH yg diberi sosialisasi	56 sampel, 24 sampel, 350 usaha	195.518.855
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium LH Kab/Kota	DLH	Jumlah usaha/keg yang dianalisa air limbahnya	200 sampel & sertifikat	225.261.021	Pengelolaan Laboratorium LH Kab/Kota	DLH	Jumlah usaha/keg yang dianalisa air limbahnya	200 sampel & sertifikat	225.261.021
2.11..03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Jumlah informasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan LH yang disampaikan	40 informasi	21.056.318	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Jumlah informasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan LH yang disampaikan	40 informasi	21.056.318
2.11..03.2.02.01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	DLH	Jumlah informasi perinagtan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diberikan pada masyarakat terdampak	4 media cetak, 40 banner	21.056.318	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	DLH	Jumlah informasi perinagtan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diberikan pada masyarakat terdampak	4 media cetak, 40 banner	21.056.318
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	100%	18.360.138	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota		Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	100%	18.360.138

2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	DLH	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran	3 rapat	18.360.138	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	DLH	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran	3 rapat	18.360.138
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKAAGAMAN HAYATI (KEHATI)		a.Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. b.Persentase luas RTH perkotaan	6 Ha, 12.40%	4.620.249.804	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKAAGAMAN HAYATI (KEHATI)		a.Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. b.Persentase luas RTH perkotaan	6 Ha, 12.40%	4.620.249.804
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota		Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	6 Ha	4.620.249.804	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota		Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	6 Ha	4.620.249.804
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan	DLH	Jumlah taman yang dikelola	2.37 Ha	2.722.790.184	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan	DLH	Jumlah taman yang dikelola	2.37 Ha	2.722.790.184
	Pengelolaan RTH	DLH	Peningkatan luas tutupan lahan	6 Ha	247.493.905	Pengelolaan RTH	DLH	Peningkatan luas tutupan lahan	6 Ha	247.493.905
	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	DLH	Jumlah lembaga yang berwawasan lingkungan	30 lembaga	389.054.745	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	DLH	Jumlah lembaga yang berwawasan lingkungan	30 lembaga	389.054.745
	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	DLH	Jumlah sarana dan prasarana taman	27 titik lokasi	1.260.910.970	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	DLH	Jumlah sarana dan prasarana taman	27 titik lokasi	1.260.910.970
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a. 14, b. 4 %	34.536.938	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a. 14, b. 4 %	34.536.938
2.11.05.2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota		Jumlah data limbah B3 di Kab Sampang yang terakomodir	1 dok	34.536.938	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota		Jumlah data limbah B3 di Kab Sampang yang terakomodir	1 dok	34.536.938
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	DLH	Jumlah laporan hasil koordinasi limbah B3 yang disusun	1 dok	34.536.938	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi	DLH	Jumlah laporan hasil koordinasi limbah B3 yang disusun	1 dok	34.536.938

	denga Pemerintah Propinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengoilahan, dan/atau penimbunan		terpenuhi			dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengoilahan, dan/atau penimbunan		terpenuhi		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	31%	158.500.921	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	31%	158.500.921
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang berijin dan taat	30 usaha	158.500.921	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang berijin dan taat	30 usaha	158.500.921
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	DLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH yang diterbitkan	30 rekomendasi	104.200.852	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	DLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH yang diterbitkan	30 rekomendasi	104.200.852
2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	DLH	Jumlah laporan hasil pengawasan	150 hasil pengawasan	54.200.069	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	DLH	Jumlah laporan hasil pengawasan	150 hasil pengawasan	54.200.069
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	4%	26.195.792	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	4%	26.195.792

2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota		Persentase pelaku usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan	100%	26.195.792	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota		Persentase pelaku usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan	100%	26.195.792
2.11.08.2.01.02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	DLH	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang didampingi	3 komunitas	26.195.792	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	DLH	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang didampingi	3 komunitas	26.195.792
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LH		Persentase penyelesaian pengaduan di bidang LH	100%	32.340.507	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LH		Persentase penyelesaian pengaduan di bidang LH	100%	32.340.507
2.11.10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH) Kab/Kota		Persentase penyelesaian pengaduan dibidang perlindungan pengelolaan LH	100%	32.240.507	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH) Kab/Kota		Persentase penyelesaian pengaduan dibidang perlindungan pengelolaan LH	100%	32.240.507
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	DLH	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum	5 pengaduan	32.340.507	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	DLH	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum	5 pengaduan	32.340.507
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277
2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277	Pengelolaan sampah		a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277

2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	DLH	Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R	125 ton	481.929.645	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	DLH	Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R	125 ton	481.929.645	
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	DLH	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dan diproses sampai TPA	7200 ton	3.348.258.960	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	DLH	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dan diproses sampai TPA	7200 ton	3.348.258.960	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	DLH	Pengadaan bak sampah karet, pengadaan bak sampah mobile, pengadaan mesin pengolahan sampah	205 bh, 31 unit, 2 unit	1.941.852.542	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	DLH	Pengadaan bak sampah karet, pengadaan bak sampah mobile, pengadaan mesin pengolahan sampah	205 bh, 31 unit, 2 unit	1.941.852.542	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPS/TPST/SPA Kab/Kota	DLH	Pengadaan flow meter, pengadaan incinerator sampah, pengadaan value	2 unit, 1 unit, 1 unit	668.737.130	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPS/TPST/SPA Kab/Kota	DLH	Pengadaan flow meter, pengadaan incinerator sampah, pengadaan value	2 unit, 1 unit, 1 unit	668.737.130	
JUMLAH TOTAL					22.429.154.429	JUMLAH TOTAL					22.429.154.429

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2021.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5	6	6
A PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI						
Kegiatan Konservasi rehabilitasi lingkungan dan pertamanan						
1	Penanaman bibit	Lahan kritis DAS Kali Kamoning 1.122 ha dan DAS Blega untuk ditanami agar mengurangi banjir	Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	1.122	ha	POKIR
B PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana persampahan						
1	Pengadaan Kontainer	Kabupaten Sampang	Persentase penanganan timbulan sampah	1	unit	POKIR

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah berasal dari Pagu Indikatif Kewilayahan dan Pokok Pikiran .

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2022** dengan Tema “**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**”.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan
			Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan

	kesempatan kerja	tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target
			2022
1	2	3	4
	Tujuan:		
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	54,30
		Indeks Kualitas Udara	80
		Indeks Kualitas tutupan Lahan	87,01
	Sasaran:		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Udara	66,67

		Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air	72
		Ruang Terbuka Hijau	34,40

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pada pencapaian **misi 3 yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 3 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**. ”.

Adapun program - program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Perencanaan lingkungan hidup
- Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)

- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3)
- Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- Program pengelolaan persampahan

Program - program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasa ran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11						22,429,154,429						23,550,612,141							
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	10,379,567,466				100 %	10,898,545,836			
2	11	01	2.01			Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%		%	100 %	30,899,525				100 %	32,444,501			
2	11	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja dan perubahan Renja DLH Kab. Sampang yg disusun Penyusunan Renstra DLH Kab. Sampang yg disusun				2 dok 1 dok	3,667,325	Kab. Sampa ng, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkun g Hidup, Meningk atkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampan g	2 dok 1 dok	3,850,691	DINAS LINGK UNGA N HIDUP

2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yg disusun				1 dok	5,580,700	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampan g	1 dok	5,859,735	DINAS LINGK UNGA N HIDUP
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah penyusunan perubahan RKA yg disusun				1 dok	3,975,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampan g	1 dok	4,173,750	DINAS LINGK UNGA N HIDUP
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yg disusun				1 dok	3,906,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampan g	1 dok	4,101,300	DINAS LINGK UNGA N HIDUP

2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan perubahan DPA yg disusun				1 dok	4,975,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah daerah (adum)	Kabupat en Sampang	1 dok	5,223,750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan LPPD, LKPj, LKjIP, SAKIP, RB yg disusun				5 dok	8,795,500	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah daerah (adum)	Kabupat en Sampang	5 dok	9,235,275	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%		%	100 %	8,944,506,554						100 %	9,391,731,882	

2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN Jumlah pembayaran Honorer Daerah Jumlah pembayaran honor PA/KPA/PPK Jumlah pembayaran honor pengurus barang dan pembantu pengurus barang Jumlah pembayaran honor PPBJ dan PPHP Pembayaran TPP ASN				14 bulan 14 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	8,889,754,420	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah daerah (adum)	Kabupat en Sampang	14 bulan 14 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	9,334,242,141	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK				45 jenis	40,395,494	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah daerah (adum)	Kabupat en Sampang	45 jenis	42,415,268	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan				12 bulan	4,080,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampang	12 bulan	4,284,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah penyusunan laporan akhir tahun yg disusun				1 laporan	4,841,730	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampang	1 laporan	5,083,817	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan yg disusun Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran yg disusun Jumlah penyusunan laporan keuangan triwulanan yg disusun				12 laporan 2 laporan 4 laporan	5,434,910	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampang	12 laporan 2 laporan 4 laporan	5,706,656	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	170,290,000						100 %	178,804,500	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atributnya				314 orang	108,975,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintahan daerah (adum)	Kabupat en Sampang	314 orang	114,423,750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi /seminar				20 OK	61,315,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintahan daerah (adum)	Kabupat en Sampang	20 OK	64,380,750	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah selama 1 th	%		%	100 %	337,412,946						100 %	354,283,591	

2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				15 jenis	17,937,330	Kab. Sampa ng, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkun g an Hidup, Meningk atkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampan g	15 jenis	18,834,196	DINAS LINGK UNGA N HIDUP
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	-------------	------------	---	--	---	---	------------------------------	-------------	------------	--------------------------------------

2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer yang terpenuhi Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor yang terpenuhi Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik Jumlah alat pembersih Jumlah obat - obatan				6 jenis 20 buah 36 jenis 12 set 1 buah 25 buah	40,989,715	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah daerah (adum)	Kabupat en Sampang	6 jenis 20 buah 36 jenis 12 set 1 buah 25 buah	43,039,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
---	----	----	------	----	--	---	--	--	--	---	------------	--	--------------------------------------	---	---	--------------------	---	------------	------------------------

2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 th				12 jenis	43,682,925	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampan g	12 jenis	45,867,071	DINAS LINGK UNGA N HIDUP
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan				36 exempl a	3,840,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampan g	36 exempl a	4,032,000	DINAS LINGK UNGA N HIDUP
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu				96 OK	39,610,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahana n Bencana Dan Perubaha n Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerint ahan daerah (adum)	Kabupat en Sampan g	96 OK	41,590,500	DINAS LINGK UNGA N HIDUP

2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah BBM Jumlah rapat Perjalanan Dinas Biasa Jumlah Rapat Perjalanan Dinas Dalam Kota Penyediaan makanan dan minuman rapat				3648 liter 40 OK 60 OK 1359 OK	191,352,976	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkung- an Hidup, Meningk- atkan Ketahana- n Bencana Dan Perubaha- n Iklim	6. Prioritas penunjan- g urusan pemerint- ahan daerah (adum)	Kabupat- en Sampan- g	3648 liter 40 OK 60 OK 1359 OK	200,920,624	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang penunjang urusan Pemerintah Daerah terpenuhi	%		%	100 %	367,491,381						100 %	385,865,950	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2				7 unit	195,000,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkung- an Hidup, Meningk- atkan Ketahana- n Bencana Dan Perubaha- n Iklim	6. Prioritas penunjan- g urusan pemerint- ahan daerah (adum)	Kabupat- en Sampan- g	7 unit	204,750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubel untuk kantor terpenuhi				3 jenis	23,615,570	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah daerah (adum)	Kabupat en Sampang	3 jenis	24,796,349	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan bahan komputer Jumlah komputer yang terpenuhi Jumlah laptop yang terpenuhi Jumlah Layar proyektor yang terpenuhi Jumlah LCD Proyektor yg terpenuhi Jumlah printer yang terpenuhi Jumlah TV yang terpenuhi				2 unit 1 unit 6 unit 1 unit 1 set 4 unit 2 unit	148,875,811	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah daerah (adum)	Kabupat en Sampang	2 unit 1 unit 6 unit 1 unit 1 set 4 unit 2 unit	156,319,601	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi	%		%	100 %	94,083,801						100 %	98,787,991	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim				985 surat	4,061,593	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintahan daerah (adum)	Kabupat en Sampang	985 surat	4,264,673	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, air dan komunikasi				12 bulan	79,822,208	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintahan daerah (adum)	Kabupat en Sampang	12 bulan	83,813,318	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor instruktur senam Jumlah ADV/ucapan hari jadi				12 bulan 6 kali	10,200,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah an daerah (adum)	Kabupat en Sampang	12 bulan 6 kali	10,710,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yg terpenuhi	%		%	100 %	403,450,000						100 %	423,622,500	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan sewa Jumlah pemeliharaan kendaraan Jumlah perizinan, pajak kend/ops terpenuhi				1 kendar aa 3 kendar aa 90 kendar a	262,900,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah an daerah (adum)	Kabupat en Sampang	1 kendar aa 3 kendar aa 90 kendar a	276,045,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel				21 unit	6,300,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah an daerah (adum)	Kabupat en Sampang	21 unit	6,615,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				53 unit	22,250,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah an daerah (adum)	Kabupat en Sampang	53 unit	23,362,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				3 gedung	112,000,000	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintah an daerah (adum)	Kabupat en Sampang	3 gedung	117,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase kebutuhan penataan organisasi untuk Perangkat Daerah yg terpenuhi	%		%	100 %	31,433,259						100 %	33,004,921	
2	11	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kegiatan pameran yg terlaksana Jumlah kegiatan pawai yg terlaksana				1 kegiatan 1 kegiatan	31,433,259	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Prioritas penunjan g urusan pemerintahan daerah (adum)	Kabupaten Sampang	1 kegiatan 1 kegiatan	33,004,921	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	%		%	29 %	276,788,392						29 %	290,627,812	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan LH	%		%	100 %	276,788,392						100 %	290,627,812	

2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kab Sampang yang terpenuhi				3 dok	276,788,392	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	3 dok	290,627,812	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	a) Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan; b) Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	%		%	a) 31; b) 15,90 %	460,196,332						a) 31; b) 15,90 %	483,206,146	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat	usaha		usaha	350 usaha	420,779,876						350 usaha	441,818,869	

2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sampel air yg dianalisa Jumlah sampel udara ambien yg dianalisa Jumlah usaha/keg yg belum memiliki ijin lingkungan/ ijin PPLH yg diberi sosialisasi				56 sampel 24 sampel 350 usaha	195,518,855	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	56 sampel 24 sampel 350 usaha	205,294,797	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang dianalisa air limbahnya				200 sampel & sertifikat	225,261,021	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	200 sampel & sertifikat	236,524,072	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan LH yang disampaikan	informasi		informasi	40 informasi	21,056,318						40 informasi	22,109,133	

2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yg diberikan pada masyarakat terdampak Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yg diberikan pada masyarakat terdampak				4 media cetak 40 banner	21,056,318	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	4 media cetak 40 banner	22,109,133	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	%		%	100 %	18,360,138						100 %	19,278,144	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran				3 rapat	18,360,138	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	3 rapat	19,278,144	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	a) penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air; b) Persentase luas RTH perkotaan	%		%	a) 6.00; b) 12.40 %	4,620,249,804					a) 6.00; b) 12.40 %	4,851,262,294		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Ha		Ha	6 Ha	4,620,249,804					6 Ha	4,851,262,294		
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah taman yang dikelola				2.37 ha	2,722,790,184	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	2.37 ha	2,858,929,693	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan luas tutupan lahan				6 ha	247,493,905	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	6 ha	259,868,600	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah lembaga yang berwawasan lingkungan				30 lembaga	389,054,745	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	30 lembaga	408,507,482	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana taman				27 titik lokasi	1,260,910,970	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	27 titik lokasi	1,323,956,519	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	a) Persentase penanganan timbulan sampah; b) Persentase pengurangan timbulan sampah	%		%	a) 14.00; b) 4.00 %	34,536,938						a) 14.00; b) 4.00 %	36,263,784	

2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data limbah B3 di Kabupaten Sampang yg terakomodir	dok		dok	1 dok	34,536,938					1 dok	36,263,784		
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah laporan hasil koordinasi limbah B3 yang disusun terpenuhi				1 dok	34,536,938	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	1 dok	36,263,784	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	%		%	31 %	158,500,921						31 %	166,425,966	

2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang berijin dan Taat	usaha		usaha	30 usaha	158,500,921						30 usaha	166,425,966	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH yg diterbitkan				30 rekom	104,300,852	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	30 rekom	109,515,894	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan				150 hasil pengawasan	54,200,069	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	150 hasil pengawasan	56,910,072	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	%		%	4.00 %	26,195,792					4.00 %	27,505,581		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang berwawasan lingkungan	%		%	100 %	26,195,792					100 %	27,505,581		
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang didampingi				3 komunitas	26,195,792	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	3 komunitas	27,505,581	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Pengaduan di Bidang Lingkungan Hidup	%		%	100 %	32,340,507						100 %	33,957,532	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%		%	100 %	32,340,507						100 %	33,957,532	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum				5 pengaduan	32,340,507	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	5 pengaduan	33,957,532	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a) Persentase penanganan timbulan sampah; b) Persentase pengurangan timbulan sampah	%		%	a) 14.00; b) 4.00 %	6,440,778,277						a) 14.00; b) 4.00 %	6,762,817,190	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan timbulan sampah	%		%	14 %	6,440,778,277						14 %	6,762,817,190	

2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R				125 ton	481,929,645	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	125 ton	506,026,127	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkut diolah dan diproses sampai di TPA/TPS/SPA Kab/Kota				7200 ton	3,348,258,960	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	7200 ton	3,515,671,908	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan bak sampah karet Pengadaan bak sampah mobile Pengadaan mesin pengolahan sampah				205 buah 31 unit 2 unit	1,941,852,542	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	205 buah 31 unit 2 unit	2,038,945,169	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengadaan flow meter Pengadaan incenerator sampah Pengadaan valve				2 unit 1 unit 1 unit	668,737,130	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Kabupaten Sampang	2 unit 1 unit 1 unit	702,173,986	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL											22,429,154,429					23,550,612,141			

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mengampu urusan lingkungan hidup. Program-program Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana**”. Sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.01	Program penunjang urusan lingkungan hidup			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			22.429.154.429
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	10.379.567.466
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 %	30.699.525
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RPJMD, Renstra, dan Renja)	3 Dokumen	3.667.325
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.580.700
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	3.975.000
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.906.000
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	4.975.000
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, SPIP dan RB) yang disusun	5 Dokumen	8.795.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan laporan keuangan yang	100 %	8.944.506.554

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		baik dan tepat waktu		
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	102 orang	8.889.754.420
2.11.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	40.395.494
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	4.080.000
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	4.841.730
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	2 Dokumen	5.434.910
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dengan jumlah ASN OPD	100 %	170.290.000
2.11.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta atributnya	314 org	108.975.000
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek / Diklat	20 OK	61.315.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	337.412.946
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan	15 Jenis	17.937.330
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	6 jenis	40.989.715
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	43.682.925
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran tagihan surat kabar	12 Bulan	3.840.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman staff meeting dan tamu yang difasilitasi	96 Ok	39.610.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah BBM, jumlah perjalanan dinas biasa, jumlah perjalanan dinas dalam kota, penyediaan makanan dan minuman rapat	3648 ltr, 40 OK, 60 OK, 1359 OK	191.352.976
2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	367.491.381
2.11.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	195.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.11.01.2.07.05	Pengadaan meubel	Jumlah Pengadaan mebel	3 Jenis	23.615.570
2.11.01.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan bahan computer, jumlah computer, jumlah laptop, jumlah layar proyektor, jumlah LCD, jumlah printer, jumlah TV	2 unit, 1 unit, 6 unit, 1 unit, 1 set, 4 unit, 2 unit	148.875.811
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	100 %	94.083.801
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat tekirim	985 surat	4.061.593
2.11.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran listrik, telpon dan air	12 bulan	79.822.208
2.11.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Honor instruktur senam, jumlah ADV/ucapan hari jadi	12 bulan, 6 kali	10.200.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	403.450.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan sewa, jumlah pemeliharaan kendaraan, jumlah perijinan, pajak kend/ops terpenuhi	1 kend, 3 kend, 90 kend	262.900.000
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	21 unit	6.300.000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	53 unit	22.250.000
2.11.01.2.09.09	Penataan organisasi	Jumlah kegiatan pameran, jumlah kegiatan pawai	1 keg, 1 keg	31.433.259
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase tersedianya dokumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	29%	276.788.392
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kab. Sampang yang terpenuhi	3 dok	276.788.392
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	a. Persentase pelaku usahayang taat terhadap peraturan lingkungan, b. Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditangani	31%, 15.90%	460.779.876
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat	350 usaha	420.779.876
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah , air, udara, dan laut	Jumlah sampel air yang dianalisa, jumlah sampel udara ambient yang dianalisa, jumlah usaha/keg yg belum memiliki ijin lingk/ijin PPLH yg diberi	56 sampel, 24 sampel, 350 usaha	195.518.855

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		sosialisasi		
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium LH Kab/Kota	Jumlah usaha/keg yang dianalisa air limbahnya	200 sampel & sertifikat	225.261.021
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota	Jumlah informasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan LH yang disampaikan	40 informasi	21.056.318
2.11.03.2.02.01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang diberikan pada masyarakat terdampak	4 media cetak, 40 banner	21.056.318
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota	Persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani	100%	18.360.138
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah rapat koordinasi hasil uji sumber pencemaran	3 rapat	18.360.138
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKAAGAMAN HAYATI (KEHATI)	a.Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. b.Persentase luas RTH perkotaan	6 Ha, 12.40%	4.620.249.804
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kab/Kota	Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	6 Ha	4.620.249.804
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan	Jumlah taman yang dikelola	2.37 Ha	2.722.790.184
	Pengelolaan RTH	Peningkatan luas tutupan lahan	6 Ha	247.493.905
	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah lembaga yang berwawasan lingkungan	30 lembaga	389.054.745
	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana taman	27 titik lokasi	1.260.910.970
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3	a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a. 14, b. 4 %	34.536.938
2.11.05.2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 daerah Kab/Kota	Jumlah data limbah B3 di Kab Sampang yang terakomodir	1 dok	34.536.938
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengoilahan, dan/atau penimbunan	Jumlah laporan hasil koordinasi limbah B3 yang disusun terpenuhi	1 dok	34.536.938

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	31%	158.500.921
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yang berijin dan taat	30 usaha	158.500.921
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan /atau izin PPLH yang diterbitkan	30 rekomendasi	104.200.852
2.11.06.2.01.03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan	150 hasil pengawasan	54.200.069
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	4%	26.195.792
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan	100%	26.195.792
2.11.08.2.01.02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah komunitas peduli lingkungan yang didampingi	3 komunitas	26.195.792
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LH	Persentase penyelesaian pengaduan di bidang LH	100%	32.340.507
2.11.10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH) Kab/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan dibidang perlindungan pengelolaan LH	100%	32.240.507
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran hukum	5 pengaduan	32.340.507
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277
2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah	a.persentase penanganan timbulan sampah, b.persentase pengurangan timbulan sampah	a.14, b.4%	6.440.778.277
2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah pengurangan sampah dari sumber ke TPA melalui TPS3R	125 ton	481.929.645
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah sampah yang dipilah dikumpulkan diangkat diolah dan diproses sampai TPA	7200 ton	3.348.258.960

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Kab/Kota			
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pengadaan bak sampah karet, pengadaan bak sampah mobile, pengadaan mesin pengolahan sampah	205 bh, 31 unit, 2 unit	1.941.852.542
2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPS/TPST/SPA Kab/Kota	Pengadaan flow meter, pengadaan incinerator sampah, pengadaan value	2 unit, 1 unit, 1 unit	668.737.130

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp. 22.429.154.429,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 7 program dan 20 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup dan lingkup Kabupaten Sampang.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPDP Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.”**

Hasil evaluasi atas Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 95,00% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah **“Meningkatkan pemabngunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup** Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan Urusan Unsur Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp. 22.429.154.429,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 7 program dan 20 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup dan lingkup Kabupaten Sampang.

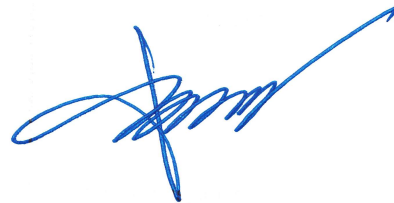
5.1 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPDP dan disinkronkan dengan prioritas

- pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
 3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMPANG



A.FAISOL ANSORI, SP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19730303 199803 1 005